



Analisis Kinerja Anggaran Belanja Dalam Laporan Keuangan

Nurain Hakim¹, Julie Abdullah², Wahyudin Hasan³

¹Akuntansi Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

Email: nurainhakim13@gmail.com

Keywords:

Kinerja; Anggaran;
Belanja

Abstract. *The aim of the research was to analyze the movement of the budget in financial reports at the Youth and Sports Service from 2018-2020. The analysis used includes: Expenditure variant analysis, expenditure compatibility analysis, and expenditure efficiency ratios. The method used is a quantitative method presented in the form of figures presented in the Budget Realization Report. From the results of the researchers, it can be seen that: (1) the results of the 2018-2020 analysis of the spending variance for the Sports Youth Service show good performance, meaning that the government has made good use of the spending budget. (2) The analysis of spending harmony, especially in spending operations in 2019-2020 shows a fairly series performance. so that it can be said that the government is efficient in the use of the budget.*

Abstrak. Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja anggaran belanja dalam laporan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2018-2020. Analisis yang digunakan meliputi: Analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hasil peneliti dapat diketahui bahwa: (1) hasil Analisis varians belanja Dinas Pemuda Olahraga tahun 2018-2020 menunjukkan kinerja yang baik artinya pemerintah telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik. (2) Analisis keserasian belanja terutama dalam belanja operasi pada tahun 2019-2020 menunjukkan kinerja yang cukup serasi Sementara untuk belanja modal pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kinerjanya masi kurang baik (3) Efisiensi belanja tahun 2018-2020 Dinas Pemuda Olahraga telah melakukan penghematan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah efisien dalam penggunaan anggaran belanja.

Corresponden author:

Email: nurainhakim13@gmail.com

Pendahuluan

Era otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan berupa pelayanan kepada masyarakat, suatu daerah tidak dapat menjalankannya tanpa adanya

anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan dasar agar pemerintah mampu beroperasi. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. kinerja itu sendiri ialah suatu perencanaan kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan tugasnya berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai selama periode waktu tertentu, serta menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. dengan ini terdapat tujuan adanya anggaran sektor publik yaitu untuk meningkatkan penilaian publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2014). Anggaran ini sangat wajib sebab terdapat kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan seterusnya berkembang. Setiap lembaga pemerintah wajib membuat anggaran agar masyarakat mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik itu sendiri.

Anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Kareran sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah dan meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Definisi ukuran dan indikator kinerja yang di kemukakan bahwa LRA sebagai alat ukur finansial dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian LRA harus disajikan tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dalam konteks kinerja pemerintah di Indonesia, penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pemerintah. Salah satunya laporan keuangan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango yang mana disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu komponen yang merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja berdasarkan LRA adalah komponen belanja daerah. Belanja daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). sedangkan menurut (Mahmudi, 2019) Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Penekanan pada kinerja anggaran belanja daerah menjadi titik perhatian pemerintah terutama dalam perbaikan kearah yang lebih baik dan transparan serta tepat tujuan. Dalam pengelolaan anggaran belanja pemerintah menggunakan anggaran belanjanya lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, terutama terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas. Dengan melihat adanya anggaran pendapatan belanja yang sudah kelebihan pembayarannya maka pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi belanja terhadap kinerja anggaran belanja tersebut, sehingga terjadi pemborosan dalam pengelolaan anggaran belanja. Tidak hanya itu, terdapat tidak serasinya anggaran pendapatan belanja pemerintah dimana alokasi dana anggaran pendapatan belanja yang sudah ditetapkan tetapi anggaran pendapatan belanjanya tidak digunakan dengan semestinya maka hal tersebut dapat merugikan masyarakat serta mengakibatkan kualitas setiap program yang dijalankan belum optimal. Faqihudin, (2013) mengemukakan jika belanja lebih kecil dari jumlah anggaran maka kinerja baik, sebaliknya apabila realisasi lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka kinerja anggaran dikatakan kurang baik, atau berdasarkan persentase jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan. Sementara itu indikator dalam mengukur kinerja anggaran belanja ialah kuantitatif yang dimana dalam mengukur kinerja itu sendiri dapat menggunakan varians belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Darise, 2007). Menurut Mahsun, (2006) pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui finansial dan nonfinansial.

Aini, Kenamon, & Anggraini, (2020) dalam penelitiannya tentang analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017 menunjukkan bahwa Kinerja APBD Kabupaten Morowali dilihat dari analisis kinerja belanja daerah: (1) Analisis Varians Belanja dinilai baik karena memiliki selisih positif (2) Rasio Keserasian belanja operasi dinilai serasi sedangkan belanja modal dinilai kurang serasi, dimana Kabupaten Morowali lebih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal (3) Analisis Efisiensi Belanja dinilai efisien. Dalam penelitian Poyoh, Murni, & Tulung, (2017) tentang analisis kinerja pendapatan dan belanja pada Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon dapat dilihat juga dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan pendapatan daerahnya menunjukkan kinerja dalam mengelola pendapatan dikatakan belum baik hal ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa BKD belum mampu merealisasikan pendapatannya lebih dari yang dianggarkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kinerja anggaran belanja dilihat dari rasio varians belanja, rasio keserasian belanja serta rasio efisien belanja.

Metode

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu menggunakan rasio varians belanja, rasio keserasian belanja, serta rasio efisiensi belanja. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam memanfaatkan anggaran belanjanya.

Purwaningsih & Khabibah, (2021) mengemukakan mengenai standar rasio varians belanja digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran belanjanya. Adapun rumus dan standar rasionya sebagai berikut:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

Sumber : (Purwaningsih & Khabibah, 2021)

Baik : Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
 Kurang Baik : Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Rasio keserasian belanja digunakan untuk mengetahui pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal (Tatik & Rizaldi, 2020). Adapun rumus dan standar rasionya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Tatik & Rizaldi, 2020)

Sangat Serasi : >100%
 Serasi : 90%-100%
 Cukup Serasi : 80%-90%
 Kurangi Serasi : 60%-90%
 Tidak Serasi : <60%

Rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Tatik & Rizaldi, 2020). Adapun rumus dan standar rasionya sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Tatik & Rizaldi, 2020)

Tidak Efisien : >100%
 Kurang Efisien : >90%-100%
 Cukup Efisien : >80%-90%
 Efisien : >60%-80%
 Sangat Efisien : <60%

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Varians Belanja

Dari analisis yang dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango mulai tahun 2018-2020 dengan hasil perhitungan analisis varians belanja sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih
2018	7.488.146.941,00	7.107.163.701,00	380.983.240,00
2019	4.434.879.139,00	4.364.155.022,00	70.724.117,00
2020	2.688.283.533,00	2.658.168.928,00	30.114.605,00

Sumber : data diolah 2022

Dari hasil tabel 1 pada tahun 2018 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 380.983.240,00% hal ini merupakan hasil total anggaran belanja terdaftar sebesar Rp 7.488.146.941,00 yang dikurangi dengan hasil total realisasi belanja sebesar Rp 7.107.163.701,00. Sehingga dapat dikatakan kinerja anggaran belanja pemerintah daerah untuk tahun 2018 baik karena realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.

Pada tahun 2019 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 70.724.117,00 hal ini merupakan hasil total anggaran belanja terdaftar sebesar Rp. 4.434.879.139,00 yang dikurangi dengan hasil total realisasi belanja sebesar Rp. 4.364.155.022,00 Sehingga dapat dikatakan kinerja anggaran belanja pemerintah daerah untuk tahun 2019 baik karena realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.

Pada tahun anggaran 2020 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 30.114.605,00 hal ini merupakan hasil total anggaran belanja terdaftar sebesar Rp. 2.688.283.533,00 yang dikurangi dengan hasil total realisasi belanja sebesar Rp. 2.658.168.928,00 Sehingga dapat dikatakan kinerja anggaran belanja pemerintah daerah untuk tahun 2020 baik karena realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.

Analisis Keserasian Belanja

Dari Analisis yang dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango mulai tahun 2018-2020 dengan hasil perhitungan analisis keserasian belanja sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Keserasian Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Keserasian belanja	
				Belanja Operasi	Belanja Modal
2018	4,914,719,901.00	2.192.443.800.00	7,107,163,701.00	69,15%	30,85%
2019	4.060.535.881.00	303.619.141.00	4.364.155.022.00	93,04%	69,57%
2020	2.513.838.928.00	144.330.000.00	2.658.168.928.00	94,58%	5,42%

Sumber : Data diolah 2022

Dari hasil tabel 2 perhitungan untuk tahun anggaran 2018 yang di alokasikan ke belanja operasi sebesar 69,15% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja operasi yang terdaftar sebesar Rp. 4.914.719.901,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 7.107.163.701,00. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja kurang serasi karena berada diantara tingkat presentase 60%-80%. Adapun untuk anggaran yang di alokasikan ke belanja modal pada tahun 2018 sebesar 30,85% merupakan hasil total realisasi belanja modal yang terdaftar sebesar Rp. 2.192.443.800,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 7.107.163.701,00. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja tidak serasi karena berada diantara tingkat presentase <60%.

Perhitungan untuk tahun anggaran 2019 yang di alokasikan ke belanja operasi sebesar 93,04% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja operasi yang terdaftar sebesar Rp. 4.060.535.881,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 4.364.155.022,00. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja serasi karena berada diantara tingkat presentase 90%-100%. Adapun untuk anggaran yang di alokasikan ke belanja modal pada tahun 2019 sebesar 69,57% merupakan hasil total realisasi belanja modal yang terdaftar sebesar Rp.303.619.141,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp.4.364.155.022,00. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja kurang serasi karena berada diantara tingkat presentase 60%-80%.

Perhitungan untuk tahun anggaran 2020 yang di alokasikan ke belanja operasi sebesar 94,58% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja operasi yang terdaftar sebesar Rp. 2.513.838.928,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 2.658.168.928,00. Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja serasi karena berada diantara tingkat presentase 90%-100%. Adapun untuk anggaran yang di alokasikan ke belanja modal pada tahun 2020 sebesar 5,42% merupakan hasil total realisasi belanja modal yang terdaftar sebesar Rp. 144.330.000,00 dibandingkan dengan total belanja sebesar Rp. 2.658.168.928,00 Sehingga dapat dikatakan peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja tidak serasi karena berada di

antara tingkat presentase <60%.

Analisis Efisiensi Belanja

Dari Analisis yang dilakuka pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango mulai tahun 2018-2020 dengan hasil perhitungan analisis efisiensi belanja sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efisiensi Belanja 2018-2020

Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio Efisiensi Belanja
2018	7.107.163.701.00	7.488.146.941.00	94,91%
2019	4.364.155.022.00	4.434.879.139.00	98,40%
2020	2.658.168.928.00	2.688.283.533.00	98,87%

Sumber : data diolah, 2022

Dari hasil tabel 3 pada tahun 2018 untuk penggunaan efisiensi anggaran belanja sebesar 94,91% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja terdaftar sebesar Rp. 7.107.163.701,00 dibandingkan dengan hasil total anggaran belanja sebesar Rp 7.488.146.941,00. Sehingga dapat dikatakan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup efisien karena berada diantara tingkat >80%-90%.

Pada tahun 2019 untuk penggunaan efisiensi anggaran belanja sebesar 98,40% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja terdaftar sebesar Rp. 4.364.155.022,00 dibandingkan dengan hasil total anggaran belanja sebesar Rp 4.434.879.139,00. Sehingga dapat dikatakan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup efisien karena berada diantara tingkat >80%-90%.

Pada tahun 2020 untuk penggunaan efisiensi anggaran belanja sebesar 98,87% hal ini merupakan hasil total realisasi belanja terdaftar sebesar Rp. 2.658.168.928,00 dibandingkan dengan hasil total anggaran belanja sebesar Rp. 2.688.283.533,00. Sehingga dapat dikatakan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup efisien karena berada diantara tingkat >80%-90%.

Pembahasan

Analisis Varians Belanja

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Kriteria
2018	7.488.146.941,00	7.107.163.701,00	380.983.240,00	Baik
2019	4.434.879.139,00	4.364.155.022,00	70.724.117,00	Baik
2020	2.688.283.533,00	2.658.168.928,00	30.114.605,00	Baik

Sumber : data diolah, 2022

Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja dengan realisasi belanja pada tahun 2018 terdapat selisih sebesar Rp. **380.983.240,00**. Kemudian pada tahun 2019 terdapat selisih sebesar Rp. 70.724.117,00. Namun pada tahun 2020 terdapat selisih varians belanja sebesar Rp. 30.114.605,00. Artinya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tergolong dalam kriteria baik yang menunjukkan angka yang positif. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang telah dilakukan pemerintah lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan mencapai kurang dari 100%. Maka pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh (Faqihudin, 2013) bahwa kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan.

Analisis Keserasian Belanja

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Kriteria
2018	4,914,719,901.00	7,107,163,701.00	69,15%	Kurang Serasi
2019	4.060.535.881.00	4.364.155.022.00	93,04%	Serasi
2020	2.513.838.928.00	2.658.168.928.00	94,58%	Serasi

Sumber: data diolah, 2022

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Dari tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa analisis keserasian yang telah dilakukan terhadap data belanja operasi pada tahun 2018 sebesar 69,15%. Kemudian pada tahun 2019 penggunaan anggaran belanja operasi meningkat sebesar 93,04% dengan kriteria serasi. Selanjutnya pada tahun 2020 anggaran belanja operasi terjadi peningkatan juga mencapai sebesar 94,58% dengan kriteria serasi. Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran belanja operasi lebih mendominasi ke belanja daerah seperti belanja barang dan jasa yang digunakan untuk sarana dan prasarana. Maka penggunaan dana anggaran belanja operasi lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan mencapai kurang dari 100%. Artinya pemerintah telah melakukan penghematan dalam belanja operasi tersebut. Sehingga terbukti bahwa pemerintah optimal dalam memprioritaskan alokasi dana anggaran belanjanya. Temuan ini sejalan dengan penjelasan (Mahmudi, 2007) yang menyatakan pada umumnya proposi belanja operasi mendominasi total belanja daerah mencapai 60-90%.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	Kriteria
2018	2.192.443.800.00	7,107,163,701.00	30,85%	Tidak Serasi
2019	303.619.141.00	4.364.155.022.00	69,57%	Kurang Serasi
2020	144.330.000.00	2.658.168.928.00	5,42%	Tidak Serasi

Sumber: data diolah, 2022

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Dari tabel 6 hasil perhitungan untuk belanja modal pada tabel 6 dimana pada tahun 2018 belanja modal sebesar 30,85% dengan kriteria tidak serasi. Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 69,57%. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 5,42% dengan kriteria tidak serasi. Angka tersebut turun dari tahun ke tahun dikarenakan pada tahun 2018-2020 pemerintah melakukan belanja modal secara rutin seperti belanja tanah, belanja gedung maka mencapai 100% artinya dana anggaran belanja yang digunakan melebihi untuk belanja modal tersebut. Sehingga terbukti bahwa pemerintah belum optimal dalam memprioritaskan alokasi dana anggaran belanja terutama dalam belanja modal

Efisiensi Belanja

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio Efisiensi Belanja	Kriteria
2018	7.107.163.701.00	7.488.146.941.00	94,91%	Cukup Efisien
2019	4.364.155.022.00	4.434.879.139.00	98,40%	Cukup Efisien
2020	2.658.168.928.00	2.688.283.533.00	98,87%	Cukup Efisien

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dinas pemuda dan olahraga menggunakan anggaran belanja sebesar 94,91% Kemudian pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 98,40% dengan kriteria cukup efisien Selanjutnya terjadi kenaikan juga pada tahun 2020 sebesar 98,87% dengan kriteria cukup efisien. Hal ini disebabkan karena semua perhitungan persentase rasio efisien tidak lebih dari 100% maka pemerintah efisien dalam penggunaan anggaran belanja sehingga terjadi penghematan setiap tahunnya khususnya pada tahun 2018-2020. Temuan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh (Faqihudin, 2013) Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Analisis varians belanja Dinas Pemuda Olahraga tahun 2018-2020 menunjukkan kinerja yang baik artinya pemerintah telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik. (2) Analisis keserasian belanja terutama dalam belanja operasi pada tahun 2019-2020 menunjukkan kinerja yang serasi artinya pemerintah optimal dalam memprioritaskan alokasi dana anggaran belanjanya. Sementara untuk belanja modal pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang baik dan berada pada kriteria tidak serasi artinya pemerintah belum optimal dalam memprioritaskan alokasi dana anggaran belanja. (3) Efisiensi belanja tahun 2018-2020 Dinas Pemuda Olahraga telah melakukan penghematan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah efisien dalam penggunaan anggaran belanja.

Daftar Pustaka

- Aini, H., Kenamon, M., & Anggraini, Y. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 18. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1393>
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Gorontalo: Indeks.
- Faqihudin, M. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. *Permana*, 4(2), 1–22.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Salempa Empat.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKTN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Poyoh, C. M., Murni, S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 5(2), 745–752.
- Purwaningsih, H., & Khabibah, N. A. (2021). Analisis Anggaran Belanja Untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261>
- Tatik, T., & Rizaldi, M. R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 303–311. Retrieved from <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/7704>